

Dari “Nasion” menuju Masyarakat Pancasila, kilas balik 110 tahun Kebangkitan Nasional

Dri Arbaningsih

I.

Memperingati 110 tahun *Kebangkitan Nasional*, adalah menghadirkan kembali suatu peristiwa penting yang bukan saja sekedar untuk diperingati, tetapi juga untuk dicermati kembali, direnungkan maknanya, kemudian diteruskan kepada generasi berikut, agar Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, senantiasa ingat, bahwa *tanah Indonesia, kebangsaan Indonesia dan bahasa kesatuan Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia* adalah wujud kemenangan dari *anak bangsa yang cerdas, yang berwawasan ke depan, yang gigih dan gagah berani* dalam mewujudkan visinya *bahwa hak hidup segala bangsa adalah merdeka dan berkarya untuk nusa bangsa*.

Sebelas dasa warsa bukanlah waktu yang sebentar, dan peristiwa *Kebangkitan Nasional* itu bukan satu peristiwa tunggal seperti layaknya peristiwa memperingati ulang tahun yang bisa diulang setiap tahun. *Kebangkitan Nasional* adalah sebuah proses yang memiliki *awal dan akhir*, seperti proses menjadinya *Bangsa Indonesia*, yang berawal dari *persatuan* dalam kemajemukan (**Boedi Oetomo**) dan berakhir bersatu dalam *kesatuan* cita-cita (**Indonesia Merdeka**).

II.

Pada mulanya, *Bung Karno* Presiden Republik Indonesia pertama, menyebut *Kebangkitan Nasional* sebagai *Kebangunan Nasional* (1946), yaitu peristiwa terbangunnya *rasa persatuan dan rasa berbangsa* kaum muda dari berbagai etnis : *Jong Java, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond*, dan *Jong-Jong* lainnya, dalam peristiwa *Soempah Pemoeda 1928*, di *Weltevreden*, ibu kota *Nederlands Indie* (Hindia Belanda). Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, sementara Belanda masih berkuasa di Hindia Belanda ? (1870-1945) Itulah kelebihan *Kebangkitan Nasional* para muda Bangsa Indonesia.

Semenjak VOC dibubarkan (1603-1799), kekuasaan atas Hindia Belanda vakum, tak bertuan, sehingga Hindia Belanda diserahkan oleh kongsi dagang VOC kepada Kerajaan Belanda. Atas usul petinggi Kerajaan Belanda, *Van den Bosch*, diberlakukanlah Tanam Paksa ke II di

seluruh Pulau Jawa untuk mengembalikan hutang VOC. Tanam Paksa II (1840-1870) meninggalkan kenangan terburuk bagi tanah Jawa, karena diselenggarakan semena-mena, diluar perikemanusiaan, sampai-sampai hampir seluruh bangsa Eropah memaksa, agar Ratu Wilhelmina dari Belanda menghentikannya lewat seruan *Politik Etis*. Dari kondisi kehidupan selama kolonialisasi Belanda yang tidak manusiawi itu atas penduduk Pribumi, khususnya di tanah Sunda dan Jawa pada umumnya, semenjak saat itu, mereka tidak lagi memiliki kesadaran berbangsa (*etno-nasionalisme*), karena martabat terinjak-injak dan harga dirinya terkoyak-koyak. (Multatuli, *Max Havelaar*, 1860) Komitmen mereka terhadap dirinya sendiri hanya sekedar untuk kelangsungan hidup saja, lupa akan jati diri, yang disebut Kartini sebagai *amnesia sosial*. (Dri Arbaningsih, 2005)

Dalam situasi dan kondisi demikian, sampai dengan tahun 1903, para siswa STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandse Artsen* atau Sekolah Pendidikan untuk Dokter Pribumi/Jawa), masih beranggapan, bahwa Hindia Belanda adalah tanah kelahiran mereka. Situasi itu berubah secepat kilat, ketika surat korespondensi *RA Kartini*, dari Jepara, yang ditujukan kepada siswa STOVIA, menyampaikan gagasannya, bahwa mereka, sesungguhnya, “bukan sekedar kaum Pribumi dari Hindia Belanda, melainkan kaum muda dari Jawa, **Jong Javanen**.” (1903) Menurut wawasan *Kartini*, Jawa adalah sebuah ‘nasion’.” karena memiliki *bahasa, seni, budaya, sejarah* dan *wilayah* (Alfian, 1998). Dalam suratnya pula, *Kartini* menuturkan betapa bahagianya ia dapat menjadi *mbakyu* (kakak) dari *pemuda-pemuda yang berpikiran maju*. *Kartini* juga menyampaikan kepada mereka perihal mimpinya tentang sebuah *Dunia Baru*, tanpa penindasan antar *manusia* dan *tanpa penindasan antar bangsa*, namun ia merasa, bahwa bila saatnya tiba, ia mungkin tidak akan mengalaminya. (Dri Arbaningsih, 2005)

III.

Seorang *dr Wahidin Soedirohoesodo*, gagal mencari dana untuk beasiswa pemuda-pemuda Jawa yang cerdas dan berbakat, yang tidak mampu membayar biaya sekolah. Sayang sekali rencana mulia itu tidak didukung para Bupati. Atas saran *dr Tjipto Mangoenkoesoemo*, ia pergi ke STOVIA menemui, adiknya, siswa R *Gunawan Mangunkoesoemo*, yang mengatur pertemuan *dr Wahidin* dengan kawan-kawan siswa sahabat pena *Kartini*, yang pada saat itu sedang berkabung, karena *Kartini* dikabarkan wafat pasca persalinan. (1904) Dengan gagasan berlatar belakang menyiapkan *Dunia Baru* yang bebas merdeka, *dr Wahidin* menghimbau kepada siswa R. *Soetomo*

dan siswa *Soeradji* bersama kawan-kawan lainnya mendirikan satu *wadah persatuan* dalam bentuk organisasi modern. Usul tersebut disetujui, bahkan ditambah usulan *R Soewarno*, agar organisasi yang akan dibentuk itu memakai nama **Boedi Oetomo**, sebagai peringatan bahwa pendirian organisasi tersebut berangkat dari dasar tujuan yang mulia.

Boedi Oetomo, organisasi Pribumi modern pertama, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Pimpinan pengurus diserahkan kepada siswa *Raden Soetomo* dibantu oleh siswa-siswa: *Moh. Saleh, Mas Soeleiman, R. Soeradji, Raden Mas Goembreg, Mas Angka, R. Gunawan Tjiptomangunkoesoemo, Soewarno, Mas Soewarno*. Berkat visi dan misi organisasi yang berorientasi kepada **pencerdasan kehidupan Bangsa**, *R. Soetomo* diberi konsesi mengelola **Boedi Oetomo**, selama 29 (*duapuluh Sembilan tahun*) oleh *Pemerintah Otonomi Hindia Belanda*. Untuk itu, *R. Soetomo* beserta kawan-kawan pendiri, **berjanji untuk tetap berjalan pada jalur pendidikan**. Namun dihadapan kawan-kawan, *R. Soetomo* menyampaikan bahwa “*hari depan bangsa dan Tanah Air ada di tangan mereka.*” **Boedi Oetomo** menjadi organisasi modern Pribumi pertama yang memiliki ijin beroperasi.

Lima bulan pasca berdirinya **Boedi Oetomo**, atas saran *dr Wahidin Soedirohoesodo*, diselenggarakanlah **Kongres I** di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. **Kongres I** berjalan sukses berkat kerjasama yang baik diantara anggota dengan melakukan estafet, yaitu setiap penerima undangan Kongres wajib meneruskan kepada tiga anggota lainnya. Akhirnya, **Boedi Oetomo** mampu menyelenggarakan **Kongres I** yang dihadiri oleh 700 peserta dari berbagai kota, Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, Ponorogo. Dalam **Kongres I** tersebut ditetapkan kepemimpinan baru diserahkan kepada para “*sesepuh*”, sementara para Pengurus lama mohon ijin untuk menyelesaikan studi mereka di STOVIA.

Pada saat serah terima kepengurusan, siswa *Soewarno* mohon kepada para “*sesepuh*”, agar menerima titipan organisasi **Boedi Oetomo** dengan tulus ikhlas, untuk mewujudkan cita-cita **Boedi Oetomo**, yaitu *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Selanjutnya, pinta siswa *Soewarno*, “*apabila kepengurusan baru tidak melaksanakan amanah pencerdasan kehidupan bangsa dengan semestinya, maka para pendiri akan menarik kembali titipan tersebut.*” Dengan menyerahkan kepengurusan **Boedi Oetomo** kepada *Raden Adipati Tirtokoesoemo*, mantan Bupati Karanganyar dan kepada *Pangeran Ario Noto Dirodjo* dari keraton Pakualaman, diharapkan dari para

bangsawan timbul perhatian untuk memberikan dukungan kepada upaya dr Wahidin mencari dana bea siswa.

R. Soetomo dan kawan kawan, pendiri **Boedi Oetomo** berhasil menyelesaikan studi tanpa ujian berkat keberhasilan mereka membasmi epidemi Malaria di salah satu Desa di wilayah pedalaman. Usai menyelesaikan studinya, para pendiri organisasi **Boedi Oetomo** diangkat menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda dengan jabatan dokter Jawa. Sebagai cucu *dr Mas Soeleiman*, penulis merasa berkepentingan untuk menyampaikan, bahwa dimanapun *dr Mas Soeleiman* ditempatkan, bukan merupakan halangan bagi almarhum Eyang untuk mendirikan sekolah rakyat di tempat tersebut. Dapat dipastikan, bahwa para pendiri *Boedi Oetomo* melakukan hal sama : *tetap setia kepada visi misi organisasi, berdharmabakti kepada masyarakat dalam situasi apapun dan kondisi bagaimanapun*. Disamping itu para Pendiri, tetap mendampingi, memonitor organisasi untuk memastikan bahwa kepengurusan baru **Boedi Oetomo** tetap berpegang pada komitmennya, mewujudkan cita-cita *pencerdasan kehidupan Bangsa*. Oleh karena itu, sudahlah patut bila nama pendiri **Boedi Oetomo** diabadikan lewat pemberian nama pada sebuah *Rumah Sakit Umum Daerah*, di tanah kelahiran atau sekitarnya.

IV.

Di jaman kolonialisme Belanda, banyak para pemuda dan pemudi dari golongan menengah keatas, dari berbagai kampung halaman yang tersebar di seluruh wilayah *Nederlands Indie* (Hindia Belanda/Nusantara), yang berbeda bahasa satu dengan lainnya, datang dari jauh ke *Weltevreden* untuk menuntut ilmu. Agar dapat mengikuti pelajaran, para siswa diharuskan menguasai Bahasa Belanda. Oleh karena itu, Bahasa Belanda mendominasi alam pikir mereka, bukan saja di bidang ilmu pengetahuan akademik, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Sehingga, Bahasa Belanda terkondisikan menjadi alat komunikasi para siswa. Akibatnya, setiap *Pribumi* yang merantau ke *Weltevreden*, pada umumnya, menguasai dua bahasa, yaitu Bahasa Ibu daerah masing-masing dan Bahasa Belanda.

Kehadiran Bahasa Belanda ditengah-tengah komunitas dari berbagai daerah dengan Bahasa Ibu masing-masing, mendudukan Bahasa Belanda sebagai alat komunikasi yang lebih tinggi peringkatnya dari Bahasa Ibu, karena mampu berperan sebagai media komunikasi, sementara Bahasa Ibu tidak mampu, karena kelokalannya. Oleh karena itu, mereka akhirnya menyadari perlunya *Bahasa persatuan* yang bisa menggantikan peran Bahasa Belanda.

Sementara itu para pemuda dan pemudi Bumiputera yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke Negeri Belanda juga mengalami persoalan dan menghadapi tantangan, namun berbeda. Pada umumnya *Indische Vereeniging* yang didirikan oleh RM Noto Soeroto, 1908, merupakan perkumpulan para muda mudi seperti layaknya kehidupan muda mudi Bangsa Belanda, yaitu berpesta dansa dan berpidato. Situasi berubah dengan kedatangan *Soewardi Soerjaningrat* dan *dr Tjipto Mangoenkoesoemo* (1913) yang ditangkap dan dibuang ke Belanda oleh karena tulisan “*Als ik eens en Nederlander was*”. Oleh karena situasi politik meningkat, maka *Indische Vereeniging* saat itu dijadikan ajang pertemuan untuk berbincang memikirkan masa depan Hindia Belanda. Untuk itu diterbitkanlah buletin *Hindia Poetera* yang bertujuan menyampaikan isu politik, dan gagasan anti-kolonial, namun tidak berhasil. Pada tahun 1922, *dr Soetomo* berkesempatan memimpin perkumpulan itu, kemudian *Iwa Koesoemasoemantri*, 1923, memimpin *gerakan non-kooperasi*, berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerjasama dengan Belanda. Baru dibawah pimpinan M. *Nazir Datuk Pamuntjak*, pada tahun 1924, para Bumiputera benar-benar berubah haluan dengan mengubah nama perkumpulan menjadi *Indonesische Vereeniging* dan dalam tempo sebentar berubah menjadi *Perhimpoean Indonesia*. Dibawah pimpinan *Soekirman Wirjosandjojo*, *Perhimpoean Indonesia* diresmikan, dan buletin *Hindia Poetra* berganti nama menjadi majalah *Indonesia Merdeka*. Ketika *Moh. Hatta* memimpin *Perhimpoean Indonesia* (1926-1930), majalah *Indonesia Merdeka* terbit dwibulanan dengan harga berlangganan 2,5 gulden per tahun. Artikelnya lebih menyoroti situasi anti-kolonialisme di Hindia Belanda. Semenjak itu, nama *Indonesia* digunakan oleh mahasiswa *Bumiputera* di Belanda sebagai identitas mereka, setiap menghadiri berbagai konperensi pemuda di Eropah, termasuk *bung Hatta*.

Berita pengadopsian nama Indonesia oleh mahasiswa Bumiputera di Eropah cukup mengemparkan mereka yang berada di Hindia Belanda. Berita lewat majalah *Indonesia Merdeka* yang dikirim dari Belanda membuat komunitas kepemudaan dan para siswa di *Weltevreden* lebih tanggap terhadap apa yang terjadi, dan merasa perlu berembuk mengenai situasi dan kondisi baru yang tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Akhirnya bersepakatlah kelompok dari berbagai Jong dengan perkumpulan kepemudaan lainnya untuk menyelenggarakan **Kongres Pemoeda-Pemoeda Indonesia I**, pada tanggal *30 April – 2 Mei, 1926*, dimana mereka akan mengumpulkan berbagai *data* dan *informasi* yang diperlukan dari berbagai sumber tentang prinsip-prinsip *nasionalisme (kesatuan, kemerdekaan, persamaan, kepribadian, perilaku)*, (Kartodirdjo, 1998) untuk di telaah serta dicermati dalam konteks *Indonesia Merdeka*. Bilamana hasil temuan dan

kesimpulan dari **Kongres I** diterima oleh seluruh siswa dan komunitas *kepemudaan para Jong* yang berada di *Weltevreden*, maka disepakati akan dirumuskan dalam **Kongres Pemoeda Indonesia II** serta diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Menjelang tahun 1926 - 1928, para pemuda dan pemudi baik yang berada di Negeri Belanda maupun yang berada di *Weltevreden* tampaknya bertekad untuk benar-benar menggunakan kesempatan dalam **Kongres I dan II** untuk saling bertukar pikiran dan pendapat tentang *Indonesia Merdeka*. Sehingga, patut dibanggakan, betapa bersungguh-sungguhnya mereka menyiapkan **Kongres Pemoeda-Pemoeda I - II** dengan persiapan selama dua tahun. (1926-1928)

Bagaimanapun juga *wawasan etno-nasional* yang disebarluaskan oleh **Boedi Oetomo** semenjak 1908, secara perlahan berimbas kepada munculnya berbagai komunitas kepemudaan para *Jong* dan berbagai *perkumpulan agamis, nasionalis, independen*. Situasi ini merupakan benih yang nampaknya menjanjikan bagi tumbuhnya satu *persatuan* komunitas kepemudaan tanpa predikat. Ditambah lagi dengan menyebarnya isu tentang perkembangan pergerakan kemerdekaan Indonesia lewat majalah *Indonesia Merdeka* dari Negeri Belanda, meningkatkan wawasan kebangsaan mereka untuk dibicarakan dalam **Kongres I-II** di *Weltevreden*.

V. **Kongres Pemoeda Pemoeda Indonesia I (30 April -2 Mei 1926)**

Saat yang dinanti-nanti tiba, yaitu tanggal 30 April 1928. Komunitas kepemudaan para *Jong* yang terdiri dari : *Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon*; dari etnis Tionghwa : *Kwee Thiam Hong, John Lauw, Tjoen Hok, Oey Kay Siang, Tjoi Djien Kwie* dan dari berbagai perkumpulan pemuda lainnya, menggalang persatuan.

Ada seorang nona Minahasa bernama *Stien Adam* membacakan makalahnya dalam **Kongres Pemoeda Indonesia I**. Sayang sekali, isi makalah itu tidak diabadikan, sehingga tidak diketahui apa yang diharapkan olehnya dari Kongres Pemoeda ini.

- **Kongres Pemoeda – Pemoeda Nasional II (26 - 28 Oktober 1928)**

Pimpinan **Kongres II** diserahkan kepada *Soegondo Djojopoespito* dari PPPI (*Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia*), dengan wakilnya *RM Djoko Marsaid* dari *Jong Java*. Selama **Kongres** baik **ke I** maupun **ke II**, susunan panitia ditetapkan, bahwa satu pengurus mewakili satu organisasi. *Soegondo* terpilih sebagai Ketua karena bergabung dengan organisasi yang tidak bersifat kedaerahan seperti *Jong Java*. *Mohammad Yamin*, misalnya adalah anggota organisasi *Jong Sumatra* yang bersifat kedaerahan.

Hasil **Kongres I** menyampaikan pernyataan politiknya tentang *Wawasan Kebangsaan Indonesia* yang disepakati, yang kemudian dirumuskan dalam **Kongres II** serta diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagai berikut:

Pertama,

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia,

Kedua,

Kami putera dan puteri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia,

Ketiga,

Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung Bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

Ikrar tersebut disingkat atas usul *Mohammad Yamin*, dan telah disepakati oleh Sidang, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa

Pada saat menjelang penutupan, Wage Rudolf Soepratman, melantunkan lagu gubahannya “Indonesia Raya” dengan biola tanpa lirik agar tidak dicurigai intel Belanda. Lagu tersebut diterima sebagai lagu Kebangsaan Indonesia.

Menurut surat kabar *Sin Po* yang pertama kali memberitakan hasil **Kongres II**, dalam putusan Kongres II tidak terdapat kata “sumpah”, sehingga tidak diketahui proses awal perubahan nama **Kongres Pemuda II** menjadi *Soempah Pemoeda 1928*. Diasumsikan pada tahun 1950-an banyak terjadi pemberontakan, karena situasi politik kenegaraan yang terancam disintegrasi. Agar Rakyat tetap patuh kepada jalur Wawasan Kebangsaan **Kongres II**, maka dengan sengaja disakralkan menjadi **Sumpah Pemuda 1928**, barangkali terinspirasi oleh *Sumpah Palapa tahun*

1334 yang diikrarkan oleh *Mapatih Gajah Mada* dari Majapahit (abad 14), ketika menangani *Persatuan Nusantara*.

Persoalan tarik menarik antara *Etno-nasionalisme* dan *Nasionalisme* dalam isu persatuan dan kesatuan menjadi penting, karena banyaknya jumlah etnis yang bertebaran di Hindia Belanda semenjak pra-kolonial. Yang dimaksudkan *Kartini* dengan istilah “*nasion*” tidak lain adalah *etno-nasionalisme* yang saat itu terwakili oleh etnis Jawa, dimana keterkaitan satu individu Jawa dengan individu Jawa lainnya didasari oleh *warisan budaya*. Situasi awal *Boedi Oetomo 1908*, ketika baru didirikan merupakan contoh perkumpulan *etno-nasional*. Tetapi dengan perjalanan waktu dan situasi politik yang berubah, *Boedi Oetomo* berubah menjadi ajang perkumpulan *nasional*. Perkumpulan nasional berlangsung dalam dalam *Soempah Pemoeda 1928*. Asimilasi budaya hanya terjadi pada kumpulan nasional.

Seperti kata peribahasa , *untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak*, begitulah nasib *Bangsa Indonesia Muda*, dilahirkan di atas persada *Tanah Air Nusantara* yang sedang dikuasai serta di haki oleh Belanda. Barangkali tidak ada duanya di muka Bumi ini, bahwa ada *satu Bangsa lahir tanpa negara, tanpa konstitusi*, melainkan hanya berpatokan kepada itikad *persatuan dalam kebersamaan* untuk *hidup bebas merdeka di Tanah Air sendiri*.

VI.

Dua tahun menjelang **Perang Dunia II** (1939-1945), habislah sudah masa perijinan *Boedi Oetomo*. Hal ini dirasakan oleh salah satu anggota pimpinan *Boedi Oetomo*, *Dwijosewojo*, yang besar jasanya dalam hal, *pertama* mohon ijin kepada *Ratu Wilhelmina*, agar rakyat Pribumi Hindia Belanda diijinkan memiliki perwakilan di *Volksraad* (Majelis Perwakilan Rakyat), dan dikabulkan. Kemudian, jasa *kedua*, ialah mengantisipasi pecahnya **Perang Dunia II**, dimana Belanda dikhawatirkan kalah. Untuk keperluan itu, *Dwijosewojo* berinisiatip mengadakan perjalanan keliling Hindia Belanda untuk meminta rakyat Pribumi membentuk **milisi keamanan rakyat**. Alasannya, “*bila Belanda kalah, siapa yang akan membela Pribumi kalau bukan diri sendiri?*”

Berkat penyelenggaraan **Kongres Pemoeda I dan II** yang menghimpun komunitas kepemudaan di *Weltevreden* (1926-1928), maka upaya milisi *Dwijosewojo* cukup memberikan hasil memuaskan. Di berbagai propinsi Hindia Belanda yang ia kunjungi untuk menyampaikan

berita itu, ia mendapat sambutan hangat, bukan saja ia berhasil menarik kaum muda untuk turut dalam gerakan milisi tersebut, bahkan mampu menambah jumlah anggota **Boedi Oetomo** hampir keseluruhan penjuru Hindia Belanda (Nusantara).

Benar dugaan *Dwijosewojo* **Perang Dunia II** meletus (1939-1945). Tentara Sekutu menyerah, ketika *Pearl Harbour* di bom tentara Jepang. Hindia Belanda dikuasai Jepang yang bersekutu dengan Jerman. Jepang memproklamasikan diri sebagai saudara tua *Asia Raya*, dalam artian Jepang menggantikan posisi Belanda. Tidak perlu diceritakan bagaimana nasib para petinggi Belanda yang menyelenggarakan Pemerintahan Kolonial di wilayah Nusantara, tapi mereka mengalami kelaparan seperti yang dialami para petani di Lebak, Banten, semasa **Tanam Paksa II** (1840-1870).

Berita *Nagasaki* dan *Hiroshima* di jatuhi Bom Atom (6-9 Agustus 1945), membawa korban beribu penduduk sipil, merupakan peristiwa yang mengerikan bagi kehidupan manusia sesudahnya, karena cahaya letusan mengandung partikel-partikel Radioaktif merusak segala sesuatu yang dilewati, termasuk manusia. Akibat dari pemboman tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat. Betapapun kondisinya, Jepang memenuhi janji untuk membantu Indonesia mendapatkan Kemerdekaannya.

VII.

Oleh Pemerintahan balatentara Jepang **BPUPKI** (Badan Penyelidik usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) diresmikan pada tanggal 1 Maret 1945, beranggotakan 60 orang, dibawah pimpinan *KRT dr Radjiman Wedyodiningrat* dan *Raden Pandji Soeroso*.

Sidang **BPUPKI I** berlangsung pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 untuk membicarakan *bentuk negara, filsafat negara, dan dasar negara*. Pimpinan Sidang, *KRT dr Radjiman Wedyodiningrat*. Ada tiga pembicara: *Mohammad Yamin, Soepomo* dan *Soekarno*. *Soekarno* menyampaikan *Pancasila* sebagai dasar negara yang diterima secara aklamasi. 1 Juni diperingati sebagai hari lahir *Pancasila*.

Sidang **BPUPKI II** berlangsung pada tanggal 10 Juli – 14 Juli 1945. Jedah antara sidang BPUPKI Idan II yang cukup lama di pakai *Soekarno* untuk mematangkan *Pancasila*, karena ada pihak-pihak yang belum sepenuhnya setuju. Maka dibentuklah *Panitia Sembilan*, diketuai oleh *Soekarno*. Setelah mengalami perdebatan yang cukup panjang, dimana *Panitia Sembilan* belum

dapat memecahkan persoalan, akhirnya kesepakatan yang memuaskan semua pihak tertampung dalam bentuk *Piagam Jakarta*. (22 Juni 1945) Namun atas usul pihak *agama non muslim*, dan disepakati oleh kaum *Nasionalis*, terjadi penghapusan *tujuh kata* dalam rumusan akhir *Piagam Jakarta*. (18 Agustus 1945)

Sidang **BPUPKI II** membicarakan *wilayah negara, kewarganegaraan negara, rancangan UUD, Ekonomi dan Keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran*. Untuk kelancaran materi perbincangan, tanggal 11 Juli 1945, *Soekarno* membentuk *Panitia Kecil* untuk bidang *Perancang Undang-Undang (Soekarno); bidang Pembelaan Tanah Air (R. Abikoeso Tjokrosoegono); bidang Ekonomi dan Keuangan (Hatta)*. Pada tanggal 13 Juli 1945 *Soekarno* membentuk *Panitia Kecil tujuh orang*, khusus untuk menyusun *rancangan Undang-Undang*. Pada Sidang Pleno tanggal 14 Juli 1945, *Soekarno* menyampaikan laporan hasil seluruh pertemuan sidang. **BPUPKI** dianggap selesai dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.

Namun karena banyak hal yang belum tertangani, maka dibentuklah **PPKI** (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dipimpin oleh *Soekarno* dengan anggota sebanyak 27 orang masing2 mewakili daerahnya (14 Jawa, 4 Sum, 2 Sul, 1Kal,1 NTT, 1 Maluku. 1 Tionghwa, 2 Sunda, 1 Madura) untuk merumuskan *Undang-Undang Dasar 1945*.

Akhirnya langkah terakhir dalam proses pencapaian Kemerdekaan Indonesia, ialah pada tanggal 18 Agustus 1945, *Pancasila* dan *Undang-Undang Dasar 1945* diresmikan. Beberapa paragraf dari *Piagam Jakarta* dipakai sebagai *Pembukaan, Pendahuluan* serta batang tubuh *Undang Undang Dasar 1945*; memilih dan mengangkat *Soekarno* sebagai presiden, dan *Moh. Hatta* sebagai wakil presiden. Tugas Presiden dibantu oleh *Komite Nasional Indonesia Pusat* sebelum dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk *12 Kementerian; 4 Menteri Negara; membentuk Pemerintah Daerah*; Indonesia dibagi kedalam 8 *Propinsi*.

Dengan Penyampaian ***Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*** yang singkat itu, yang disampaikan oleh *Bung karno* dan *Bung Hatta* dari *Gedung Proklamasi* yang bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur no 56, Jakarta Pusat, berakhirlah perjalanan pendakian gunung *Indonesia Merdeka*.

*Itulah akhir dari perekatan potongan-potongan kain perca Kemerdekaan yang perlu dirajut dengan potongan-potongan kain perca persiapan Indonesia Merdeka lainnya. Sebuah perjalanan panjang dimana setiap peristiwa terlukis pada bagian kain perca itu. Kini kain perca **Indonesia Merdeka** telah terhampar di persada Ibu Pertiwi. Menaungi anak bangsa yang menjaga kesuburan alam semesta Nusantara, mensukuri karunia terberi. Tapi, menangisi bila kain perca koyak tercabik oleh anak bangsa yang lupa, bahwa tiap bagian kain perca itu dibayar tunai oleh pengorbanan kepentingan diri. Apa kiranya yang terjadi di bawah ini?*

- (I) 1908, Era Boedi Oetomo,
- (II) 1928, Era Soempah Pemoeda,
- (III) 1945, Era Soekarno,
- (IV) 1965, Era Gerakan 30 September,
- (V) 1967, Era Suharto,
- (VI) 1998, Era Reformasi,
- (VII) 2018, Era Jokowi,

Era III - VI adalah *Dunia Baru* yang dicita-citakan dalam wujud nyata. Benarkah itu *Dunia Baru* yang tanpa *pelecehan antar Manusia*, tanpa *penistaan antar Agama*, tanpa *pertikaian antar Partai*, tanpa *penindasan antar Bangsa*?

Kesimpulan :

Arti kata *Kebangkitan Nasional*, adalah emansipasi bangsa, dari terbelenggu menjadi bebas, dari terjajah menjadi merdeka. *Boedi Oetomo 1908* adalah perwujudan *kebangkitan I* manusia dari belenggu *kebodohan* ke *pencerdasan bangsa*. 20 tahun kemudian, *Sumpah Pemuda 1928* adalah *kebangkitan Nasional II* Bangsa Indonesia menuju *Dunia Baru: satu Nusa, satu Bangsa, satu Bahasa*, yang belum terwujud...

Kebangkitan Nasional *dari “nasion” menuju Masyarakat Pancasila* memang jalan yang panjang. Masih adakah *Kebangkitan Nasional ke III* berawal dari tahun 2018?

Jakarta, 8 Mei 2018

Dri Arbaningsih

